



**RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja PD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Tengah Tahun 2025 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran BKD Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2025.

Semarang, 4 Maret 2024

**Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Tengah**



RAHMAH NUR HAYATI, SKM, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19680520 199203 2 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa setiap perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan Rancangan awal RENJA PD berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Rancangan Renja merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat

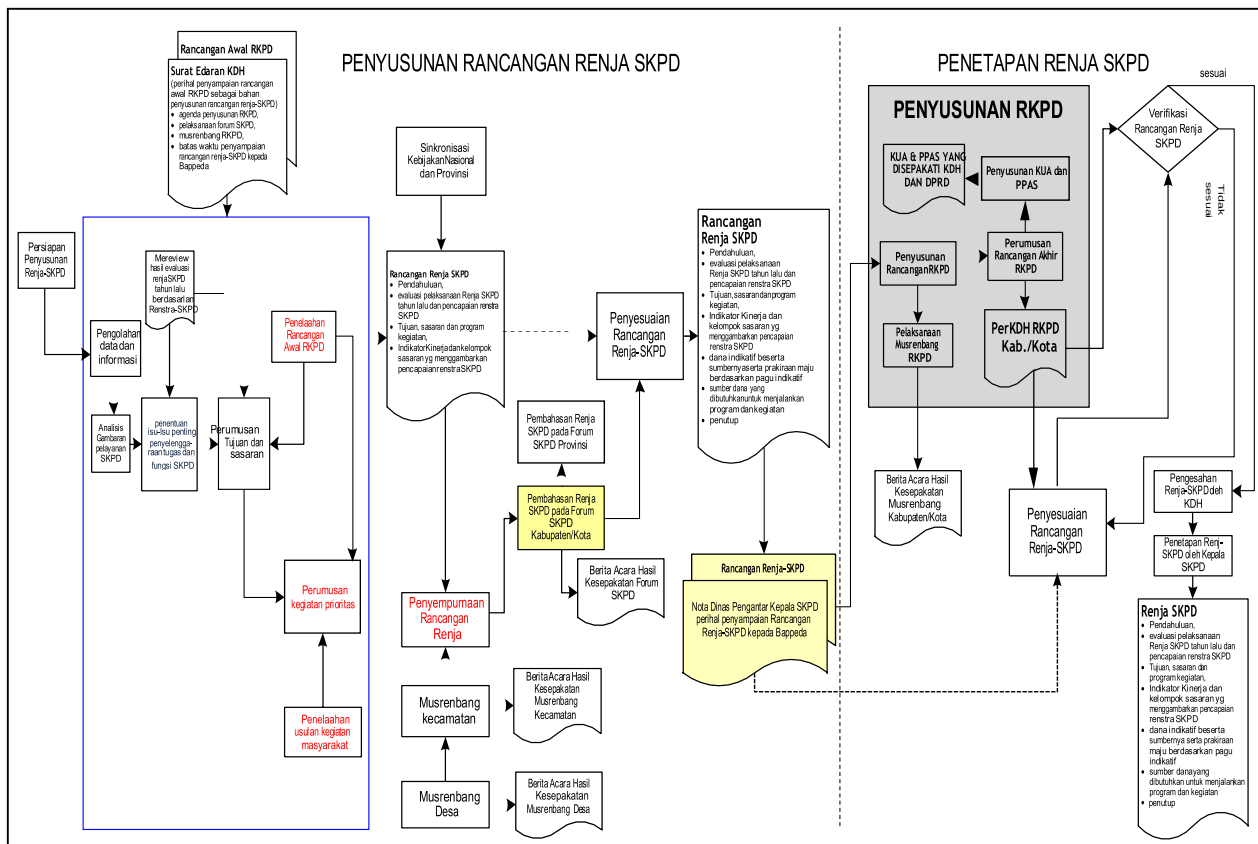
Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Penetapan Rancangan Renja Perangkat Daerah provinsi disampaikan kepada kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renja SKPD sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Keterkaitan Renja SKPD dengan RKPD
berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017



Renja SKPD/Renja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang memuat program, kegiatan, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah RKPD ditetapkan.

Renja PD yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA-SKPD/RKA- Perangkat Daerah. RKA inilah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya RKA Perangkat Daerah ini akan menjadi dasar ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran yaitu DPA, sebagai penjabaran dari APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sebagai wujud dari proses penganggaran berbasis kinerja (PBK) yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan target capaian kinerja yang diharapkan dan efisiensi dalam pencapaiannya Landasan Hukum.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 merupakan tahap kedua sebagai dari penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah yaitu “Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari.” Serta difokuskan untuk mendukung kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yaitu “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan, Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter”, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah masuk pada prioritas daerah ke-empat yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih Adaptif dan Kolaboratif” dengan fokus pada pengembangan pola karir dan pengembangan kompetensi dengan didukung oleh transformasi digitalisasi pemerintahan yang cepat dan terintegrasi.

1.2. Landasan hukum

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 10. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Nomor 5 Tahun 2019);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 104 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 104);
 23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 71);
 24. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensian antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun. Mendasarkan tujuan dan arah kebijakan serta prioritas

pembangunan daerah tersebut diatas, BKD Provinsi Jawa Tengah akan mendukung melalui implementasi, prioritas ke-empat yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Adaptif dan Kolaboratif” melalui program prioritas unsur kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah Program Kepegawaian Daerah, yang diarahkan dalam rangka mewujudkan distribusi ASN yang tepat dan akuntabel serta memberikan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah untuk menjabarkan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Tahun 2023 dan Capaian Renstra BKD
	2.2 Analisa Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD Provinsi Jawa Tengah
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN BKD
	3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKD Provinsi Jawa Tengah
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025
	4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025
	4.2 Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
BAB V	PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Tahun 2023 dan Capaian Renstra BKD

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD Tahun 2018-2023 untuk evaluasi Renja PD Tahun 2023 dan Renstra PD Tahun 2024-2026 untuk prakiraan capaian tahun 2024. Adapun program/kegiatan yang baru pada tahun 2024 dan tidak terlaksana pada tahun sebelumnya yaitu antara lain:

1. Indikator program :

- a. Persentase peningkatan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan;
- b. Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya;
- c. Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN;
- d. Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi;
- e. Persentase Kenaikan Pangkat PNS tepat Waktu;
- f. Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa ASN;
- g. Persentase penanganan pelanggaran disiplin ASN;
- h. Persentase peningkatan pemahaman atas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN.

2. Indikator Kegiatan :

- a. Persentase Peningkatan Kompetensi PNS melalui jalur Pendidikan;
- b. Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam Jabatan;
- c. Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN;
- d. Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi;
- e. Persentase Kenaikan Pangkat PNS tepat Waktu;
- f. Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa ASN;
- g. Persentase penanganan pelanggaran disiplin ASN;
- h. Persentase peningkatan pemahaman atas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN.

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 antara lain :

1. Adanya Peraturan terbaru terkait simplifikasi nomenklatur Jabatan Pelaksana, yaitu Permen PANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana PNS di Lingkungan instansi pemerintah dan Kepmen PANRB Nomor 656 Tahun 2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS di lingkungan pemerintah, mengharuskan Bidang Mutasi untuk merubah sistem mutasi jabatan pelaksana, dikarenakan adanya penyederhanaan nomenklatur pada Jabatan Pelaksana PNS;
2. Penyelesaian Tenaga Non ASN di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih belum maksimal karena tidak sesuai formasi PPPK yang dibuka dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh tenaga Non ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. Terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan Sistem Informasi dan layanan kepegawaian pada SKPD dan UPT/Satker/Sekolah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
4. Perlunya penguatan implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dan persiapan perencanaan zona integritas di BKD Provinsi Jawa Tengah.

Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut di atas adalah untuk penyusunan Renstra ke depan akan dilakukan perbaikan penyusunan target indikator program/kegiatan dan pengawalan capaiannya yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran sampai evaluasinya.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Provinsi Jawa Tengah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	BIDANG URUSAN KEPEGAWAIAN										
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya Melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar	%	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase usulan formasi ASN	%	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase peningkatan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Peningkatan Kompetensi PNS melalui jalur Pendidikan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	%	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a
	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pejabat struktural yang dilantik dari target yang diusulkan	%	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a
	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase PNS yang dilantik dalam Jabatan Fungsional	%	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase PNS yang menempuh pendidikan formal dari hasil verifikasi	%	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang dinilai PKSP	%	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam Jabatan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kepegawaian	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase CASN yang lulus seleksi pengadaan ASN	%	90	90	90	90	100	90	90	100
		Persentase layanan pensiun tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase layanan Kenaikan Pangkat tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase pegawai yang diterima dari ajuan mutasi luar Pemprov Jateng	%	75	75	75	75	100	100	100	100
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
	Mutasi dan Promosi ASN	persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Kenaikan Pangkat PNS tepat Waktu	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penanganan kasus kepegawaian	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase OPD yang mendapatkan sosialisasi Profesi ASN/Kode Etik	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang dinilai kedisiplinannya	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa ASN	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa ASN	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penanganan pelanggaran disiplin ASN	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penanganan pelanggaran disiplin ASN	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase peningkatan pemahaman atas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase peningkatan pemahaman atas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Presentase Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase dokumen digital kepegawaian yang ditargetkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase OPD yang difasilitasi dan mendapat sosialisasi penerapan Sistem Informasi Kepegawaian	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Layanan Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	60	100	60
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase PNS yang terpetakan kompetensinya	%	100	100	80	80	100	100	100	100
	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase hasil Penilaian Kompetensi PNS yang ditelaah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase pelaksanaan Uji Kompetensi	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	21	21	6	6	100	6	30	100
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	68	68	17	17	100	17	85	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	34	34	1	1	100	1	5	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	1	1	100	1	5	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	1	1	100	1	5	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	3	3	1	1	100	1	5	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	4	4	1	1	100	1	5	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	4	4	1	1	100	1	5	100

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah

Kinerja pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKD Provinsi Jawa Tengah adalah meliputi tugas:

- a. Perencanaan dan pengembangan pegawai;
- b. Mutasi;
- c. Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, dan;
- d. Informasi Kepegawaian;
- e. Penilaian Kompetensi ASN.

Dalam Bidang Perencanaan dan pengembangan pegawai, kinerja ditunjukkan dengan pelayanan terhadap seleksi dan pengiriman peserta diklat, penyusunan data formasi, pelaksanaan tugas belajar dan ijin belajar, pengelolaan dan pengembangan pegawai, ujian kedinasan, penilaian e-Kinerja bagi seluruh ASN di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, seleksi dan pelantikan jabatan struktural, penyiapan bahan seleksi administrasi mutasi jabatan struktural, penyusunan konsep pola karir, mutasi kepegawaian jabatan fungsional tertentu, penyiapan bahan administrasi pengangkatan jabatan fungsional tertentu jenjang utama.

Dalam Bidang Mutasi, kinerja ditunjukkan dengan pelayanan terhadap pelaporan SKP ASN, usulan kenaikan pangkat, pemberian cuti, pengambilan sumpah janji ASN, pengusulan kartu pegawai elektronik, penerbitan kartu istri dan kartu suami, peninjauan masa kerja, penyiapan bahan pengadaan CPNSD dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, penyiapan bahan pengangkatan CPNSD dan PNS, pengkoordinasian dan penempatan siswa IPDN, penyiapan bahan penetapan pindah dan penetapan keputusan pemberhentian PNS, penetapan keputusan bebas tugas PNS yang akan pensiun sesuai batas usia pensiun.

Dalam Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, kinerja ditunjukkan dengan pelayanan terhadap pengelolaan kesejahteraan pegawai, fasilitasi layanan kesehatan fisik dan mental bagi pegawai, pengelolaan administrasi uji kesehatan PNS, pengelolaan jaminan kesehatan kerja, pengelolaan pemberian penghargaan, pelayanan administrasi BAPETARUM PNS, penyelesaian penegakan pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian, penyusunan pedoman pelaksanaan bidang kepegawaian, layanan administrasi kepegawaian sesuai kewenangan daerah, pembinaan dan pengembangan profesi ASN, perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps ASN, pemberian rekomendasi kepada majelis kode etik instansi pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku

profesi, penyelenggaraan usaha peningkatan kesejahteraan anggota.

Dalam Bidang Informasi Kepegawaian, kinerja ditunjukkan dengan pelayanan terhadap pengelolaan sistem informasi kepegawaian, pengelolaan sistem informasi penggajian dan tunjangan kinerja PNS, pengelolaan presensi *online* PNSD, pengawasan proses pemutakhiran data kepegawaian daerah, rekonsiliasi data kepegawaian dengan Badan Kepegawaian Negara.

Kinerja pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Badan di bidang penilaian kompetensi ASN. Dalam bidang uji kompetensi ditunjukkan dengan penyusunan rencana teknis operasional di bidang perencanaan dan evaluasi dan penilaian kompetensi.

Kinerja pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2022	Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi Capaian Tahun 2023	Proyeksi Capaian Tahun 2024	Catatan Analisis
				2022	2023					
1	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar			100%	100%	100%	100%	100%	100%	Merupakan jenis indikator program dengan progres positif sehingga program ini akan tercapai pada akhir tahun RPJMD
3	Presentase PNS yang terpetakan kompetensinya			100%	100%	80%	80%	100%	100%	Jumlah PNS yang dinilai potensi dan kompetensinya melebihi target, pemasangan target yang rendah dikarenakan masih adanya pandemi COVID-19 namun ternyata pandemi mulai menurun sehingga berani untuk menambah jumlah peserta dan merupakan jenis indikator program dengan progres positif sehingga program ini akan tercapai pada akhir tahun RPJMD
4	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Presentase penanganan kasus kepegawaian			100%	100%	100%	100%		100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah

Tingkat kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tergambar dalam Tabel. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah yang meliputi tugas Perencanaan dan pengembangan pegawai, Mutasi, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, dan Informasi Kepegawaian, sehingga akan dapat terwujud melalui sinergi program dan kebijakan dalam bidang kepegawaian baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah. Disamping itu, koordinasi dan kerjasama dengan SKPD internal di pemerintah Provinsi Jawa Tengah senantiasa dibangun dan ditingkatkan dalam hal pelayanan kepegawaian. BKD Provinsi Jawa Tengah terus meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kepegawaian dalam upaya mendukung peningkatan kinerja pegawai dalam kerangka implementasi sistem merit dalam manajemen ASN. Untuk sasaran dalam Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 telah selaras dengan misi BKN dalam upaya pengembangan dan optimalisasi pelayanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi dengan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi berbasis IT. Oleh karena itu penguatan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam lingkup kepegawaian menjadi penting untuk dilakukan mengingat fungsi fasilitasi provinsi dalam beberapa ruang lingkup pelayanan kepegawaian masih menghadapi kendala dalam implementasinya, antara lain terkait validasi dan update data pegawai serta belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan dengan BKN. Selain itu dalam Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah juga melaksanakan pendampingan dalam pembuatan dokumen Renstra Kabupaten/Kota yang belum mengakomodasi indikator sistem merit, sehingga menjadi prioritas BKD Provinsi Jawa Tengah untuk membantu memberikan advokasi kepada Kabupaten/Kota untuk penerapan sistem merit.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sumber daya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan

tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah selama dua tahun terakhir selama berjalannya Renstra 2024-2026, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi secara garis besar permasalahan yang dihadapi BKD Provinsi Jawa Tengah yaitu:

- a. Kebutuhan pemenuhan pegawai untuk mengisi formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi, khususnya untuk formasi jabatan yang terkait langsung dengan pelayanan publik, seiring bertambahnya jumlah pegawai yang pensiun.
- b. Tuntutan peningkatan layanan kepegawaian yang cepat, murah dan mudah seiring perkembangan teknologi mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik.

2.3.3 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Terhadap Pencapaian Nasional/Internasional

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang RPJMD Tahun 2018 – 2023 adalah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “*Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*”.

Upaya mewujudkan visi dimaksud akan dilakukan melalui 4 (empat) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Memperluas kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Mendasarkan visi dan misi dimaksud, BKD Provinsi Jawa Tengah mendukung melalui implementasi, misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ke-2 yaitu “Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kab/Kota.” melalui program Reformasi Birokrasi di Kabupaten/Kota berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan penyelenggara manajemen ASN dan pengelola kepegawaian daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 9).

Adapun tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan kepegawaian ;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai dan informasi kepegawaian ;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan, dan kesejahteraan pegawai dan informasi kepegawaian;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan, dan kesejahteraan pegawai dan informasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan badan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dijelaskan bahwa berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan,

standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan dan pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian, membentuk Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tantangan Pelayanan Kepegawaian :

- a. Tingginya gelombang pensiun ASN ditambah dengan ketidakpastian kebijakan perencanaan pengadaan ASN, yang berakibat pada keterbatasan jumlah ASN sehingga redistribusi pemerataan jumlah ASN di setiap OPD maupun UPT menjadi opsi yang sangat logis disamping pemenuhan dari hasil mutasi masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Terbatasnya jumlah ASN dengan kualifikasi pendidikan tinggi (doctoral ke atas), sehingga pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan harus disempurnakan kembali baik skema maupun teknisnya;
- c. Pengelolaan Jabatan fungsional ke depan akan menjadi sangat strategis, sehingga perlu disiapkan dan dimatangkan kembali terkait pengembangan dan pengelolaannya;
- d. Penilaian kinerja ASN belum menggambarkan kinerja riil individu ASN, sehingga penilaian kinerja harus diarahkan pada peningkatan kinerja organisasi;
- e. Belum tersedianya standar kompetensi jabatan untuk seluruh jabatan ASN, sehingga proses analisis kesenjangan kompetensi belum berjalan maksimal;
- f. Belum tersedianya profil kompetensi ASN secara menyeluruh berdasarkan hasil Penilaian potensi, kompetensi dan kinerja berikut analisis kesenjangannya;
- g. Penyesuaian Kembali Manajemen talenta yang ada saat ini seiring dinamika kebijakan di tingkat pusat yang kemudian berdampak ke daerah;
- h. Belum seimbang system reward and punishment ASN;
- i. Perlunya peningkatan kualitas System informasi kepegawaian baik dari sisi fungsi, fitur, jaringan dan sekuritasnya.

Peluang Pelayanan Kepegawaian :

- a. Tingginya minat ASN dari luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mutasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga penerimaan ASN melalui jalur mutasi masuk dapat menjadi opsi pemenuhan SDM yang realistis;

- b. Pemberian peningkatan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan dengan tugas belajar, difokuskan pada beberapa jenis rumpun keilmuan sebagaimana kebutuhan dan prioritas daerah baik jenjang Magister maupun Doktoral, baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga motivasi ASN untuk mengikuti program tugas belajar tinggi dan mendukung tercapainya kinerja daerah;
- c. Tingginya minat ASN untuk beralih ke jabatan Fungsional harus diimbangi dengan peningkatan tata kelola pengelolaan jabatan fungsional, sehingga keberadaan jabatan fungsional akan menjadi pilihan karir yang strategis;
- d. Pengembangan instrument penilaian kinerja diikuti dengan integrasi sistem informasi dan terintegrasi dengan kinerja organisasi;
- e. Keberadaan standar kompetensi jabatan sangat strategis, sehingga harus diakselerasi koordinasi dengan Instansi yang membidang terkait penyusunan standar kompetensi jabatan ASN;
- f. Dengan sistem informasi yang sudah terbangun, harus segera mengintegrasikan data ASN untuk penyusunan profil ASN berbasis potensi dan kompetensi dan kinerja berikut analisis kesenjangannya agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- g. Penguatan Manajemen talenta dengan memanfaatkan data base yang sudah dibangun ada saat ini dengan berdasarkan pada pola karir instansi dan pola karir nasional;
- h. Pengelolaan reward ASN baik bersifat finansial maupun non Finansial secara seimbang;
- i. Peningkatan kualitas System informasi kepegawaian baik dari sisi kualitas, fitur, fungsi, jaringan dan sekuritas serta memanfaatkan *Artificial intelligent (AI)* dalam beberapa layanan kepegawaian.

2.3.5 Isu Strategis yang Perlu ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Tahun 2025

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, serta hal-hal yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian di Jawa Tengah dalam jangka menengah, maka dapat dihasilkan rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2025 antara lain :

- a. Penataan dan penyelesaian tenaga Non ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

- b. Pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan dengan Scholarship Preparation LPDP Luar Negeri;
- c. Penyempurnaan Manajemen Talenta dan integrasi penilaian kinerja individu dengan kinerja organisasi;
- d. Perbaikan tata kelola dan pembinaan jabatan fungsional;
- e. Perbaiki proses mutasi masuk dengan memperhatikan skala prioritas, sampai dengan unit terendah;
- f. Pelaksanaan CAT Potensi online dan pengembangan metode penialain cepat kompetensi ASN (Quick Test Kompetensi);
- g. Penambahan Storage, Restrukturisasi dan pengembangan sistem informasi layanan kepegawaian serta pengembangan dokumen kepegawaian digital;
- h. Peningkatan kode etik, kode perilaku dan netralitas ASN pasca tahun politik;
- i. Penekanan pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian, khususnya angka perceraian ASN;
- j. Pelaksanaan pemberian penghargaan bagi ASN berprestasi.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu terhadap rancangan awal RKPD dilakukan melalui identifikasi program atau kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Hasil reviu dapat dilihat pada tabel 2.4 dan dapat dianalisis sebagai berikut:

Tabel 2.4
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Kepegawaian Daerah	Semarang	Persentase Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN	100%		Program Kepegawaian Daerah	Semarang	Persentase Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN	100%		
			Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam Jabatan	100%				Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam Jabatan	100%		
			Persentase Kenaikan Pangkat PNS tepat Waktu	100%				Persentase Kenaikan Pangkat PNS tepat Waktu	100%		
			Persentase Peningkatan Pemahaman atas Nilai Dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN	100%				Persentase Peningkatan Pemahaman atas Nilai Dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN	100%		
			Persentase Layanan Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan	100%				Persentase Layanan Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan	100%		
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Semarang	Persentase Tingkat Ketercapaian Kinerja Perangkat Daerah	100%		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Semarang	Persentase Tingkat Ketercapaian Kinerja Perangkat Daerah	100%		
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menampung usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai saran masukan dalam peningkatan pelayanan organisasi. Proses usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan disampaikan melalui kanal-kanal informasi BKD Provinsi Jawa Tengah antara lain website: <https://bkd.jatengprov.go.id>., whatsapp: 08112777346, twitter: @bkdjatengprov, email: bkd@jatengprov.go.id dan telpon (024) 8519421, 841581, 8318846. Selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh bidang terkait yang menangani substansi usulan/ laporan tersebut.

Usulan yang ditindaklanjuti adalah usulan yang memang menjadi ranah tupoksi BKD Provinsi Jawa Tengah yang secara program/kegiatan merupakan implementasi penyelesaian isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi BKD sesuai tujuan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengelolaan Kinerja Individu untuk mendukung kinerja Organisasi	Semarang	Tersedianya sistem informasi kepegawaian yang dapat mengukur kinerja individu untuk mendukung kinerja organisasi	1 aplikasi	Perlu dukungan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah, Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan kinerja individu untuk mendukung kinerja organisasi
2	Penyusunan SKJ untuk seluruh level Jabatan	Semarang	Tersedianya Standar Kompetensi Jabatan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	1 dokumen	Perlu dukungan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah untuk menyusun SKJ untuk seluruh level Jabatan
3	Strategi Pengembangan Kompetensi ASN	Semarang	Terlaksananya strategi pengembangan kompetensi ASN	1 kegiatan	Perlu dukungan BPSDMD Prov. Jateng dalam Strategi Pengembangan Kompetensi untuk mengatasi kesenjangan kinerja dan kompetensi
4	Penambahan Storage, Restrukturisasi dan pengembangan system informasi layanan kepegawaian serta pengembangan dokumen kepegawaian digital	Semarang	Terlaksananya sistem informasi kepegawaian berbasis digital yang cepat dan terintegrasi	49 OPD	Perlu dukungan Diskominfo Prov. Jateng untuk infrastruktur jaringan dan sekuritas

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2025 merupakan tahap kedua perencanaan pembangunan daerah 2024-2026. Sebagaimana bentuk penjabaran RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, maka untuk perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 disusun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025. Proses dan tahapan penyusunan Renja BKD tahun 2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta melaksanakan sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Renja BKD Tahun 2025 juga disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2023, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan agenda dinamika pembangunan nasional lainnya pada tahun 2025, masukan dari pokok-pokok pikiran DPRD dan berbagai pemangku kepentingan, serta memperhatikan keberlanjutan kebijakan RKPD Tahun 2024. RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 difokuskan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 yaitu “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan, Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter, dan BKD Provinsi Jawa Tengah masuk pada prioritas daerah yang ke-empat yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Adaptif dan Kolaboratif” dengan memfokuskan pengembangan pola karir dan pengembangan kompetensi yang didukung melalui transformasi digitalisasi pemerintahan yang cepat dan terintegrasi.

Renja BKD Tahun 2025 juga diselaraskan dengan RKPD Tahun 2025, RPJMN Tahun 2025-2029 dan mendukung pada pencapaian Agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), Road Map Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024, serta menerapkan peraturan perundangan yang terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2019.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja BKD Provinsi Jawa Tengah adalah untuk menjabarkan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja.

3.2.2 Sasaran Renja PD sesuai dengan Tugas, pokok dan Fungsi BKD Provinsi Jawa Tengah

Sasaran Renja PD Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Aspek perencanaan kebutuhan dan pengadaan pegawai
- b. Aspek pengembangan karir, promosi dan mutasi, dan manajemen kinerja
- c. Aspek perlindungan dan pelayanan
- d. Aspek penggajian, penghargaan dan disiplin
- e. Aspek sistem informasi

Tabel. 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
1.	Mewujudkan Meritokrasi Dalam Manajemen ASN		Indeks Sistem Merit	Indeks	0,87
		1. Distribusi Penempatan ASN Dalam Jabatan Yang Akurat dan Akuntabel	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi, dan Manajemen Kinerja	Nilai	357,5
		2. Terwujudnya Layanan Kepegawaian yang Cepat dan Terintegrasi	Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, Perlindungan dan Pelayanan, dan Sistem Informasi	Nilai	75,5
2.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	61
		1. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Indeks	3,22
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	90

3.3 Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renja PD BKD Provinsi Jawa Tengah dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagai berikut.

Tabel 3.2
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah
BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mewujudkan Meritokrasi Dalam Manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	Adanya ketidakpastian jalur karir PNS	12	Adanya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Adanya perubahan skema pelaksanaan talent scouting	Penyesuaian kembali terkait regulasi dan skema sesuai dengan kebijakan pasca Penyederhanaan Birokrasi	Kepala BKD	2026
		Gratifikasi layanan kepegawaian pusat dan daerah	12	Kebijakan Penerbitan Layanan Kepegawaian berdasarkan Instansi Pusat	Terhambatnya Layanan Kepegawaian	Koordinasi secara intensif dengan Instansi Pusat yang terkait	Kepala BKD	2026
		Integrasi sistem layanan kepegawaian pusat dan daerah	12	Antar Layanan Kepegawaian berdiri sendiri dan menjadi sistem tersendiri	Terhambatnya sinkronisasi data layanan kepegawaian	1. Mou integrasi sistem layanan kepegawaian 2. Road map layanan kepegawaian terintegrasi pusat dan daerah	Kepala BKD	2026
		Belum tersedianya Standar Kompetensi Jabatan di seluruh level jabatan	12	Penerbitan Standar Kompetensi Jabatan berdasarkan Biro Organisasi dan Instansi Pusat	Penerapan Manajemen Talenta ASN tidak maksimal	Koordinasi secara intensif dengan Biro Organisasi	Kepala BKD	2026

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

4.1. Program dan Kegiatan

Rumusan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel. 4.1
Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025		2026			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah													32.813.136.000		32.813.136.000	Badan Kepegawaian Daerah	
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)										Angka	82		82		Badan Kepegawaian Daerah	
		Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah											32.313.136.000		32.313.136.000		
			Indeks Kepuasan Masyarakat								Angka	92	32.313.136.000	92	32.313.136.000	Badan Kepegawaian Daerah	
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								32.313.136.000		32.313.136.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah					%	92	32.253.136.000	92	32.253.136.000	SEKRETARIAT	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perang kat Daerah	Lokasi
												2025		2026			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)
				X.XX.0 1.1.02			Administra si Keuangan Perangkat Daerah						27.720.170.000		27.720.170.000		
								Jumlah jenis dokumen administra si keuangan perangkat daerah yang disusun			Dokume n	12	27.720.170.000	12	27.720.170.000	SUB BAGIAN KEUAN GAN	
				X.XX.0 1.1.02. 0001					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				26.602.950.000		26.602.950.000		
										Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	150	26.602.950.000	150	26.602.950.000	SUB BAGIAN KEUAN GAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.0 1.1.02. 0002					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.022.220.000		1.022.220.000		
										Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokume n	12	1.022.220.000	12	1.022.220.000	SUB BAGIAN KEUAN GAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.0 1.1.02. 0003					Pelaksanaan Penatausaha an dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD				50.000.000		50.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perang kat Daerah	Lokasi
												2025		2026			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)
										Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	7	50.000.000	7	50.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.02.0005					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				20.000.000		20.000.000		
										Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.02.0007					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				25.000.000		25.000.000		
										Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/se mesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi	Laporan	4	25.000.000	4	25.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikato r Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perang kat Daerah	Lokasi
												2025		2026			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)
										penyusunan laporan keuangan bulanan/tri wulanan/se mesteran perangkat daerah							
				X.XX.0 1.1.03			Administra si Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						150.000.000		150.000.000		
							Jumlah jenis dokumen administra si barang milik daerah pada perangkat daerah				Dokume n	4	150.000.000	4	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEG AWAIAN	
				X.XX.0 1.1.03. 0002					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				150.000.000		150.000.000		
										Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokume n	1	150.000.000	1	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEG AWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.0 1.1.04			Administra si Pendapata n Daerah Kewenang an Perangkat Daerah						20.000.000		20.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025		2026			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)
								Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah			Laporan	2	20.000.000	2	20.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				X.XX.01.1.04.0007					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				20.000.000		20.000.000		
										Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	2	20.000.000	2	20.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						170.000.000		170.000.000		
								Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan			%	100	170.000.000	100	170.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.05.0009					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				140.000.000		140.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025		2026			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)
										Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	30	140.000.000	30	140.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.0 1.1.05.0010					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30.000.000		30.000.000		
										Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	20	30.000.000	20	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.0 1.1.06			Administra si Umum Perangkat Daerah						1.195.966.000		1.195.966.000		
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan			%	100	1.195.966.000	100	1.195.966.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.0 1.1.06.0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		20.000.000		
										Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikato r Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perang kat Daerah	Lokasi
												2025		2026			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)
										kantor yang disediakan							
				X.XX.0 1.1.06. 0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapa n Kantor				140.000.000		140.000.000		
										Jumlah paket peralatan dan perlengkapa n kantor yang disediakan	Paket	2	140.000.000	2	140.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEG AWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.0 1.1.06. 0003					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.966.000		25.966.000		
										Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	25.966.000	1	25.966.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEG AWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.0 1.1.06. 0004					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				150.000.000		150.000.000		
										Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	150.000.000	1	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEG AWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.0 1.1.06. 0005					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n				100.000.000		100.000.000		
										Jumlah paket barang cetakan dan penggandaa n yang disediakan	Paket	2	100.000.000	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEG AWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.0 1.1.06. 0008					Fasilitasi Kunjungan Tamu				150.000.000		150.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025		2026			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)
										Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	150.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500.000.000		500.000.000		
										Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	500.000.000	12	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.0011					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				110.000.000		110.000.000		
										Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	12	110.000.000	12	110.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						175.000.000		175.000.000		
								Jumlah unit			Unit	5	175.000.000	5	175.000.000	SUB BAGIAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perang kat Daerah	Lokasi
												2025		2026			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)
								barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan								UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.07.0008					Pengadaan Aset Tak Berwujud				75.000.000		75.000.000		
										Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	1	75.000.000	1	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.0010					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		
										Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	6	100.000.000	6	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; ACEH
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.112.000.000		2.112.000.000		
								Jumlah laporan penyediaa n jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			Laporan	12	2.112.000.000	12	2.112.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025		2026			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)
								yang disusun									
				X.XX.0 1.1.08. 0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.000.000		12.000.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	12.000.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.0 1.1.08. 0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				700.000.000		700.000.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	700.000.000	12	700.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.0 1.1.08. 0003					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.0 1.1.08. 0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.350.000.000		1.350.000.000		
										Jumlah laporan	Bulan	12	1.350.000.000	12	1.350.000.000	SUB BAGIAN	OPD Provinsi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025		2026			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)
										penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan						UMUM DAN KEPEGAWAIAN	; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						710.000.000		710.000.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			Unit	27	710.000.000	27	710.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				200.000.000		200.000.000		
										Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit	27	200.000.000	27	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perang kat Daerah	Lokasi
												2025		2026			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)
										dan dibayarkan pajak dan perizinannya							
				X.XX.0 1.1.09. 0005					Pemeliharaa n Mebel				20.000.000		20.000.000		
										Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	3	20.000.000	3	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.0 1.1.09. 0009					Pemeliharaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				300.000.000		300.000.000		
										Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	Unit	2	300.000.000	2	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; ACEH
				X.XX.0 1.1.09. 0010					Pemeliharaa n/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				190.000.000		190.000.000		
										Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	Bulan	12	190.000.000	12	190.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawai					%	92	60.000.000	92	60.000.000	Unit Penilaian Kompetensi	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perang kat Daerah	Lokasi
												2025		2026			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)
						an, dan keuangan perangkat daerah										ASN Kelas A	
				X.XX.01.1.06			Administra si Umum Perangkat Daerah						60.000.000		60.000.000		
								Persentase layanan administra si umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan			%	100	60.000.000	100	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.0009					Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60.000.000		60.000.000		
										Jumlah laporan penyelenggar aan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	60.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		Meningkat nya kualitas pengelolaa n risiko perangkat daerah											500.000.000		500.000.000		
			Indeks Manajem en Risiko								Angka	3,22	500.000.000	3,22	500.000.000	Badan Kepega waian Daerah	
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINT								500.000.000		500.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perang kat Daerah	Lokasi
												2025		2026			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)
					AHAN DAERAH PROVINSI												
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah					%	3,222	500.000.000	3,222	500.000.000	SEKRETARIAT	
				X.XX.01.1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						500.000.000		500.000.000		
								Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan			%	100	500.000.000	100	500.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
				X.XX.01.1.01.0001					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				250.000.000		250.000.000		
										Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	18	250.000.000	18	250.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.01.0007					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				250.000.000		250.000.000		
										Jumlah laporan evaluasi kinerja	Laporan	23	250.000.000	23	250.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025		2026			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)
										perangkat daerah							
Mewujudkan Meritokrasi Dalam Manajemen ASN													10.157.000.000		10.157.000.000	Badan Kepegawaian Daerah	
	Indeks Sistem Merit										Angka	0,87		0,87		Badan Kepegawaian Daerah	
		Terwujudnya Distribusi Penempatan ASN Dalam Jabatan Yang Akurat dan Akuntabel											6.711.000.000		6.711.000.000		
			Nilai aspek perencanaan, kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, dan manajemen kinerja								Angka	357,5	6.711.000.000	357,5	6.711.000.000	Badan Kepegawaian Daerah	
				5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								6.711.000.000		6.711.000.000		
						Persentase ASN Pemerintahan Provinsi					%	100	3.501.000.000	100	3.501.000.000	Bidang Perencanaan dan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025		2026			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)
						Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan										Pengembangan Pegawai	
				5.03.0 2.1.02			Mutasi dan Promosi ASN						600.000.000		600.000.000		
								Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam Jabatan			%	100	600.000.000	100	600.000.000	SUB BIDAN G JABATAN STRUKTURAL	
				5.03.0 2.1.02. 0003					Pengelolaan Promosi ASN				600.000.000		600.000.000		
										Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dan diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja dan rekam jejak jabatan	Orang	148	600.000.000	148	600.000.000	SUB BIDAN G JABATAN STRUKTURAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.03.0 2.1.03			Pengembangan Kompetensi ASN						2.626.000.000		2.626.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025		2026			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)
								Persentase Peningkatan Kompetensi PNS melalui jalur Pendidikan			%	100	2.626.000.000	100	2.626.000.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	
				5.03.02.1.03.0004					Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				2.256.000.000		2.256.000.000		
										Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/ Kota yang mengikuti ujian kedinasan	Orang	1000	100.000.000	1000	100.000.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan pengembangan kompetensi melalui Jalur Pendidikan	Orang	66	2.156.000.000	66	2.156.000.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.03.02.1.03.0013					Pembinaan Jabatan Fungsional ASN				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dimonitoring dan	%	100	50.000.000	100	50.000.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025		2026			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)
										diberikan pembinaan							
				5.03.0 2.1.03. 0014					Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				320.000.000		320.000.000		
										Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan fungsional	Orang	1000	20.000.000	1000	20.000.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah dokumen kepegawaian Jabatan Fungsional yang ditetapkan sesuai perundang-undangan	Dokumen	1800	300.000.000	1800	300.000.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.03.0 2.1.04			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						275.000.000		275.000.000		
								Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya			%	100	275.000.000	100	275.000.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	
				5.03.0 2.1.04. 0002					Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				275.000.000		275.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025		2026			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)
										Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terevaluasi dan terdatabase Kinerja, Sikap dan Perilakunya	Orang	38000	275.000.000	38000	275.000.000	SUB BIDAN G JABATAN STRUKTURAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi					%	100	140.000.000	100	140.000.000	Bidang Mutasi	
				5.03.02.1.02			Mutasi dan Promosi ASN						140.000.000		140.000.000		
								persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi			%	100	140.000.000	100	140.000.000	SUB BIDAN G PEMIN DAHAN DAN PEMBE RHENTIAN	
				5.03.02.1.02.0001					Pengelolaan Mutasi ASN				140.000.000		140.000.000		
										Jumlah dokumen PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten / Kota yang melakukan mutasi	Dokumen	350	140.000.000	350	140.000.000	SUB BIDAN G PEMIN DAHAN DAN PEMBE RHENTIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pemenuhan					%	100	3.070.000.000	100	3.070.000.000	Bidang Mutasi	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perang kat Daerah	Lokasi
												2025		2026			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)
						kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN											
				5.03.02.1.01			Pengadaan , Pemberhentian dan Informasi Kepegawai an ASN						3.070.000.000		3.070.000.000		
								persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN			%	100	3.070.000.000	100	3.070.000.000	SUB BIDAN G PENGANGKATAN	
				5.03.02.1.01.0002					Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				110.000.000		110.000.000		
										Jumlah dokumen Daftar Susunan Pegawai ASN Provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai formasi dan kelas jabatan	Dokumen	1	110.000.000	1	110.000.000	SUB BIDAN G PENGANGKATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025		2026			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)
				5.03.0 2.1.01. 0003					Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2.960.000.000		2.960.000.000		
										Jumlah Fasilitasi Seleksi masuk dan Pembekalan bagi peserta didik Sekolah Kedinasan Provinsi Jawa Tengah	Orang	400	60.000.000	400	60.000.000	SUB BIDAN G PENGANGKATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah seleksi pengadaan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan fasilitasi pengadaan ASN Kabupaten / Kota di Jawa Tengah	Kegiatan	1	2.900.000.000	1	2.900.000.000	SUB BIDAN G PENGANGKATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		Terwujudnya Layanan Kepegawaian yang Cepat dan Terintegrasi											3.446.000.000		3.446.000.000		
			Nilai aspek penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan								Angka	75,5	3.446.000.000	75,5	3.446.000.000	Badan Kepegawaian Daerah	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perang kat Daerah	Lokasi
												2025		2026			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)
			dan pelayanan, dan sistem informasi														
				5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								3.446.000.000		3.446.000.000		
						Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu					%	100	315.000.000	100	315.000.000	Bidang Mutasi	
				5.03.02.1.02			Mutasi dan Promosi ASN						315.000.000		315.000.000		
								Persentase Kenaikan Pangkat PNS tepat Waktu			%	100	315.000.000	100	315.000.000	SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	
				5.03.02.1.02.0002					Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				315.000.000		315.000.000		
										Jumlah penyelesaian Kenaikan Pangkat dan layanan administrasi kepegawaian PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan	Dokumen	1000	315.000.000	1000	315.000.000	SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perang kat Daerah	Lokasi
												2025		2026			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)
										Kabupaten / Kota							
						Persentase layanan sistem informasi kepegawai an yang dikembang kan					%	100	710.000.000	100	710.000.000	Bidang Informa si Kepega waian	
				5.03.0 2.1.01			Pengadaan , Pemberhen tian dan Informasi Kepegawai an ASN						710.000.000		710.000.000		
								Persentase Layanan Sistem Informasi Kepegawai an yang dikembang kan			%	60	710.000.000	60	710.000.000	SUB BIDAN G PENGE LOLA DATA KEPEG AWAIAN	
				5.03.0 2.1.01. 0010					Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				385.000.000		385.000.000		
										Persentase Penyajian Informasi dan Layanan Kepegawaian Terintegrasi Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten / Kota	%	60	385.000.000	60	385.000.000	SUB BIDAN G PENGE LOLA DATA KEPEG AWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.03.0 2.1.01. 0011					Pengelolaan Data Kepegawaian				325.000.000		325.000.000		
										Jumlah dokumen kepegawaian	Dokume n	15000 0	313.850.000	150000	313.850.000	SUB BIDAN G	OPD Provinsi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025		2026			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)
										digital ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terkelola						PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH
										Jumlah dokumen kepegawaian fisik ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten / Kota yang terkelola	Dokumen	16900	11.150.000	16900	11.150.000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN					%	100	1.021.000.000	100	1.021.000.000	Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
				5.03.02.1.03			Pengembangan Kompetensi ASN						1.021.000.000		1.021.000.000		
								Persentase Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN			%	100	1.021.000.000	100	1.021.000.000	SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI	
				5.03.02.1.03.0002					Pengelolaan Assessment Center				1.021.000.000		1.021.000.000		
										Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di	Orang	300	606.000.000	300	606.000.000	SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025		2026			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)
										Luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai potensi dan kompetensinya							
										Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai potensi dan kompetensinya	Orang	400	200.000.000	400	200.000.000	SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipetakan Potensinya	Orang	15000	215.000.000	15000	215.000.000	SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN					%	100	280.000.000	100	280.000.000	Bidang Mutasi	
				5.03.02.1.01			Pengadaan , Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						280.000.000		280.000.000		
								persentase pemenuha			%	100	280.000.000	100	280.000.000	SUB BIDAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025		2026			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)
								n kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN								G PEMIN DAHAN DAN PEMBE RHENTI AN	
				5.03.0 2.1.01. 0006					Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				280.000.000		280.000.000		
										Jumlah Penyelesaian dokumen Pemberhentian ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Dokumen	2100	280.000.000	2100	280.000.000	SUB BIDANG PEMIN DAHAN DAN PEMBE RHENTI AN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan pemahaman atas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN					%	100	1.120.000.000	100	1.120.000.000	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	
				5.03.0 2.1.01			Pengadaan , Pemberhentian dan Informasi Kepegawain ASN						275.000.000		275.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025		2026			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)
								Persentase Peningkatan Pemahaman atas Nilai Dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN			%	100	275.000.000	100	275.000.000	SUB BIDANG PENGLOLAAN KORPS PROFESI ASN	
				5.03.02.1.01.0008					Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				275.000.000		275.000.000		
										Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan Netralitas ASN	Orang	300	175.000.000	300	175.000.000	SUB BIDANG PENGLOLAAN KORPS PROFESI ASN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Persentase Peningkatan Pemahaman ASN Provinsi Jawa Tengah tentang Radikalisme dan Intoleransi	%	100	100.000.000	100	100.000.000	SUB BIDANG PENGLOLAAN KORPS PROFESI ASN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.03.02.1.04			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						845.000.000		845.000.000		
								Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa ASN			%	100	845.000.000	100	845.000.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025		2026			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)
				5.03.0 2.1.04. 0004					Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai				292.800.000		292.800.000		
										Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan penghargaan	Orang	300	292.800.000	300	292.800.000	SUB BIDAN G KESEJAHTERAAN PEGAWAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.03.0 2.1.04. 0005					Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai				92.200.000		92.200.000		
										Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten / kota yang mendapatkan Tanda Jasa	Orang	2000	92.200.000	2000	92.200.000	SUB BIDAN G KESEJAHTERAAN PEGAWAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.03.0 2.1.04. 0007					Pembinaan Disiplin ASN				180.000.000		180.000.000		
										Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten / Kota yang diberikan pembinaan disiplin	Orang	550	180.000.000	550	180.000.000	SUB BIDAN G KESEJAHTERAAN PEGAWAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025		2026			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)
				5.03.02.1.04.0008					Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				280.000.000		280.000.000		
										Persentase Penanganan Kasus dan Pelanggaran Disiplin ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	%	100	280.000.000	100	280.000.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH													42.970.136.000		42.970.136.000		

4.2 Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Manajemen risiko di level program dan kegiatan prioritas Tahun 2025 merupakan program/kegiatan yang dinilai menjadi program/kegiatan yang memberikan kontribusi cukup besar pada ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah maupun pembangunan daerah.

Tabel 4.2
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Program/Kegiatan
BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mewujudkan Meritokrasi Dalam Manajemen Asn	Indeks Sistem Merit	Adanya ketidakpastian jalur karir PNS	12	Adanya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Adanya perubahan skema pelaksanaan talent scouting	Penyesuaian kembali terkait regulasi dan skema sesuai dengan kebijakan pasca Penyederhanaan Birokrasi	Kepala BKD	2026
		Gratifikasi layanan kepegawaian pusat dan daerah	12	Kebijakan Penerbitan Layanan Kepegawaian berdasarkan Instansi Pusat	Terhambatnya Layanan Kepegawaian	Koordinasi secara intensif dengan Instansi Pusat yang terkait	Kepala BKD	2026
		Integrasi sistem layanan kepegawaian pusat dan daerah	12	Antar Layanan Kepegawaian berdiri sendiri dan menjadi sistem tersendiri	Terhambatnya sinkronisasi data layanan kepegawaian	1. Mou integrasi sistem layanan kepegawaian 2. Road map layanan kepegawaian terintegrasi pusat dan daerah	Kepala BKD	2026
		Belum tersedianya Standar Kompetensi Jabatan di seluruh level jabatan	12	Penerbitan Standar Kompetensi Jabatan berdasarkan Biro Organisasi dan Instansi Pusat	Penerapan Manajemen Talenta ASN tidak maksimal	Koordinasi secara intensif dengan Biro Organisasi	Kepala BKD	2026

BAB V

PENUTUP

Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 merupakan penjabaran RKPD tahun 2025 pada fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian. Penyusunan Rencana Kerja lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud. Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis BKD Provinsi Jawa Tengah 2024-2026 dan pagu indikatif yang selanjutnya akan menjadi pedoman penyusunan RKA-BKD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025.

Rencana Kerja ini disusun disamping sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di tahun 2025, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam bidang kepegawaian khususnya dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yaitu “Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari.” Serta fokus untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yaitu “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan, Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter.” Maka dari itu BKD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan prioritas daerah yang keempat yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Adaptif dan Kolaboratif” dengan melaksanakan Tujuan Mewujudkan Meritokrasi Dalam Manajemen ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Karena itu Rencana Kerja BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 akan dapat terlaksana apabila terdapat komitmen dari seluruh jajaran aparatur di lingkungan BKD Provinsi Jawa Tengah mulai dari pimpinan sampai dengan pelaksana dalam melaksanakan kesepakatan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

LAMPIRAN

Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Perencanaan yang berbasis risiko menjadi hal penting agar sejak awal perencanaan, perangkat daerah sudah dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin sejak akan muncul di masa yang akan datang, dan sudah dilakukan upaya mitigasi sejak awal.

a. Identifikasi Risiko

Tabel 1
Identifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	Risiko Strategis OPD	MEWUJUDKAN MERITOKRASI DALAM MANAJEMEN ASN	Indeks Sistem Merit	Beberapa jabatan teknis diisi orang yang tidak sesuai	Risiko Operasional	adanya keterbatasan kader talent pool	kinerja organisasi berjalan kurang optimal	PNS Pemprov Jateng
				Adanya ketidakpastian jalur karir PNS	Risiko Kebijakan	Adanya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Adanya perubahan skema pelaksanaan talent scouting	PNS Pemprov Jateng
				Penilaian Kinerja individu tidak optimal	Risiko Operasional	Pengisian data penilaian kinerja tidak menggambarkan kondisi sebenarnya	bahan pertimbangan penempatan dalam jabatan kurang obyektif	Pemprov Jateng
				Gratifikasi layanan kepegawaian pusat dan daerah	Risiko Fraud	Kebijakan Penerbitan Layanan Kepegawaian berdasarkan Instansi Pusat	Terhambatnya Layanan Kepegawaian	Pemprov Jateng
				Integrasi sistem layanan kepegawaian pusat dan daerah	Resiko Operasional	Antar Layanan Kepegawaian berdiri sendiri dan menjadi sistem tersendiri	Terhambatnya sinkronisasi data layanan kepegawaian	Pemprov Jateng
				Belum tersedianya Standar Kompetensi Jabatan di seluruh level jabatan	Resiko kemitraan	Penerbitan Standar Kompetensi Jabatan berdasarkan Biro Organisasi dan Instansi Pusat	Penerapan Manajemen Talenta ASN tidak maksimal	Pemprov Jateng
				Tuntutan dari PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin Berat	Resiko Legal	Ajuan Banding PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin Berat	Teguran dari Ombudsman dan Wasdal BKN	Pemprov Jateng

b. Analisis Risiko

Tabel 2
Analisis Risiko

Pernyataan Risiko	Skor/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skor/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko
Beberapa jabatan teknis diisi orang yang tidak sesuai	4	4	16	Ada	memberikan pertimbangan kepada PPK terkait potensi permasalahan yang muncul jika diisi dari yang bukan kompetensinya	Memadai	3	3	9
Adanya ketidakpastian jalur karir PNS	4	4	16	Ada	Penyesuaian kembali terkait regulasi dan skema sesuai dengan kebijakan pasca Penyederhanaan Birokrasi	Belum Memadai	4	3	12
Penilaian Kinerja individu tidak optimal	4	4	16	Ada	Penyesuaian kembali terkait dengan Permenpan RB no 6 th 2022	Memadai	3	3	9
Gratifikasi layanan kepegawaian pusat dan daerah	4	4	16	Ada	Koordinasi secara intensif dengan Instansi Pusat yang terkait	Belum Memadai	4	3	12
Integrasi sistem layanan kepegawaian pusat dan daerah	5	3	15	Ada	1. Mou integrasi sistem layanan kepegawaian 2. Road map layanan kepegawaian terintegrasi pusat dan daerah	Belum Memadai	4	3	12
Belum tersedianya Standar Kompetensi Jabatan di seluruh level jabatan	5	3	15	Ada	Koordinasi secara intensif dengan Biro Organisasi	Belum Memadai	4	3	12
Tuntutan dari PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin Berat	4	4	16	Ada	Tim BKD memberikan klarifikasi dan jawaban terhadap ASN yg mengajukan upaya banding administrasi dan berkoodinasi dengan Biro Hukum terkait ajuan Gugatan PTUN terhadap ASN yg diberhentikan	Memadai	3	3	9

c. Penetapan Risiko Prioritas

Tabel 3
Penetapan Risiko Prioritas

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	Adanya ketidakpastian jalur karir PNS	12	PNS Pemprov Jateng	Adanya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Adanya perubahan skema pelaksanaan talent scouting
2	Gratifikasi layanan kepegawaian pusat dan daerah	12	Pemprov Jateng	Kebijakan Penerbitan Layanan Kepegawaian berdasarkan Instansi Pusat	Terhambatnya Layanan Kepegawaian
3	Integrasi sistem layanan kepegawaian pusat dan daerah	12	Pemda	Antar Layanan Kepegawaian berdiri sendiri dan menjadi sistem tersendiri	Terhambatnya sinkronisasi data layanan kepegawaian
4	Belum tersedianya Standar Kompetensi Jabatan di seluruh level jabatan	12	Pemprov Jateng	Penerbitan Standar Kompetensi Jabatan berdasarkan Biro Organisasi dan Instansi Pusat	Penerapan Manajemen Talenta ASN tidak maksimal

d. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian

Tabel 4
Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	RTP	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
Tujuan : MEWUJUDKAN MERITOKRASI DALAM MANAJEMEN ASN	Indeks Sistem Merit	Adanya ketidakpastian jalur karir PNS	12	Adanya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Adanya perubahan skema pelaksanaan talent scouting	Penyesuaian kembali terkait regulasi dan skema sesuai dengan kebijakan pasca Penyederhanaan Birokrasi	Kepala BKD	2024
		Gratifikasi layanan kepegawaian pusat dan daerah	12	Kebijakan Penerbitan Layanan Kepegawaian berdasarkan Instansi Pusat	Terhambatnya Layanan Kepegawaian	Koordinasi secara intensif dengan Instansi Pusat yang terkait	Kepala BKD	2024
		Integrasi sistem layanan kepegawaian pusat dan daerah	12	Antar Layanan Kepegawaian berdiri sendiri dan menjadi sistem tersendiri	Terhambatnya sinkronisasi data layanan kepegawaian	1. Mou integrasi sistem layanan kepegawaian 2. Road map layanan kepegawaian terintegrasi pusat dan daerah	Kepala BKD	2024
		Belum tersedianya Standar Kompetensi Jabatan di seluruh level jabatan	12	Penerbitan Standar Kompetensi Jabatan berdasarkan Biro Organisasi dan Instansi Pusat	Penerapan Manajemen Talenta ASN tidak maksimal	Koordinasi secara intensif dengan Biro Organisasi	Kepala BKD	2024

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	RTP	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
Sasaran: a. Terwujudnya Distribusi Penempatan ASN Dalam Jabatan Yang Akurat dan Akuntabel	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi, dan Manajemen Kinerja	Beberapa jabatan teknis diisi orang yang tidak sesuai	16	Adanya keterbatasan kader talent pool	Kinerja organisasi berjalan kurang optimal	Memberikan pertimbangan kepada PPK terkait potensi permasalahan yang muncul jika diisi dari yang bukan kompetensinya	Kepala BKD	2024
		Penilaian Kinerja individu tidak optimal	16	Pengisian data penilaian kinerja tidak menggambarkan kondisi sebenarnya	Bahan pertimbangan penempatan dalam jabatan kurang obyektif	Penyesuaian kembali terkait dengan Permenpan RB no 6 th 2022	Kepala BKD	2024
b. Pelayanan Kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, Perlindungan dan Pelayanan, dan Sistem Informasi	Tuntutan dari PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin Berat	16	Ajuan Banding PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin Berat	Teguran dari Ombudsman dan Wasdal BKN	Tim BKD memberikan klarifikasi dan jawaban terhadap ASN yg mengajukan upaya banding administrasi dan berkordinasi dengan Biro Hukum terkait ajuan Gugatan PTUN terhadap ASN yg diberhentikan	Kepala BKD	2024

